

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TUJUAN**

**Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD**

**SASARAN**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD**

**INDIKATOR**

**Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**

KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	KEPALA BAGIAN UMUM dan KEPEGAWAIAN	KEPALA BAGIAN LEGISLASI dan RISALAH	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN dan ANGGARAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penganggaran dan Pengawasan	Standar Operasional Prosedur (SOP) Umum, Kepegawaian dan hubungan masyarakat, layanan aspirasi, kerjasama dan keprotokolan	Standar Operasional Prosedur (SOP) pengkajian peraturan perundang-undangan dan Tata Persidangan DPRD	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penganggaran, verifikasi, dan Pembukuan dan Pelaporan
Persentase peningkatan peran dan fungsi penunjang komunikasi dalam rangka kegiatan penganggaran dan pengawasan	Persentase peningkatan peran dan fungsi penunjang komunikasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan dukungan fasilitas ringan dan berat	Persentase peningkatan peran dan fungsi penunjang komunikasi dalam rangka pemahaman bantuan hukum dan kedudukan hukum anggota DPRD serta persidangan DPRD	Persentase peningkatan pengetahuan, keakhlian, keterampilan pengelola keuangan dan penyusun pelaporan
Persentase peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi budgeting, legislasi dan controlling DPRD	Persentase pengembangan dan pendayagunaan potensi aparatur dalam proses hubungan masyarakat, layanan aspirasi, kearsipan dan analisa kepegawaian	Persentase pengembangan dan pendayagunaan potensi aparatur dalam proses fasilitasi dan pengkoordinasian serta penyediaan bahan pembuatan Perda dan proses persidangan DPRD	Persentase pengembangan dan pendayagunaan media data dan informasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Persentase peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan penciptaan lembaga legislasi yang sinergis	Persentase peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD melalui penyediaan sarana dan prasarana	Persentase peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi dan penciptaan lembaga legislasi yang kredible	Persentase dukungan anggaran dalam pelaksanaan peran dan fungsi lembaga legislatif

KEPALA SUB BAGIAN DUKUNGAN PENGANGGARAN	KEPALA SUB BAGIAN DUKUNGAN PENGAWASAN	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	KEPALA SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN	KEPALA SUB BAGIAN RISALAH	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	KEPALA SUB BAGIAN VERIIKASI	KEPALA SUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Jumlah SOP dukungan penganggaran	Jumlah SOP dukungan pengawasan	Jumlah SOP inventerisasi aset bergerak dan tidak bergerak	Jumlah SOP humas, layanan aspirasi dan tata acara DPRD	Jumlah SOP kepegawaian	Jumlah SOP pengkajian perundang-undangan	Jumlah SOP penyelenggaraan rapat persidangan	Jumlah SOP pembuatan risalah	Jumlah SOP Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah SOP verifikasi dokumen dan penerbitan SPM	Jumlah SOP Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja
Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam dukungan penganggaran	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam dukungan pengawasan	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam menganalisa dan menilai aset tetap dan aset tidak tetap	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam kehumasan, layanan aspirasi dan keprotokolan dan tata acara DPRD	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam manajemen kepegawaian	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam pengkajian hukum dan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam pelaksanaan kegiatan persidangan	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam pembuatan risalah	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam perencanaan dan penganggaran	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam verifikasi dan penatausahaan keuangan	Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan keakhlian dalam
Jumlah data dan informasi dukungan penganggaran	Jumlah data dan informasi dukungan pengawasan	Jumlah data dan informasi aset	Jumlah data dan informasi aspirasi masyarakat dan agenda pimpinan DPRD	Jumlah data dan informasi personal record	Jumlah data dan informasi hukum dan perundang-undangan	Jumlah data dan informasi persidangan	Jumlah data dan informasi tata penyusunan risalah	Jumlah data dan informasi anggaran	Jumlah data dan informasi pengajuan SPP dan penerbitan SPM	Jumlah data dan informasi Realisasi Anggaran dan Belanja
Jumlah ketersediaan hasil tindak lanjut dukungan penganggaran	Jumlah ketersediaan hasil tindak lanjut dukungan pengawasan	Jumlah dokumen aset bergerak dan tidak bergerak	Jumlah ketersediaan hasil tindak lanjut aspirasi masyarakat dan hasil kegiatan pimpinan DPRD	Jumlah ketersediaan data kepegawaian	Jumlah ketersediaan bahan analisa hukum dan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan data risalah persidangan	Jumlah ketersediaan data risalah	Jumlah ketersediaan anggaran untuk fasilitasi DPRD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban fasilitasi DPRD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban fasilitasi DPRD